

Sambutan Menteri Keuangan dalam Sosialisasi PMK
Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

Jakarta, 7 Juli 2014
Dhanapala Kementerian Keuangan

Yang kami hormati Pejabat Eselon I dari Kementerian Negara dan Lembaga.
Yang kami hormati Pejabat Eselon I dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Serta peserta sosialisasi yang saya hormati.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Selamat pagi

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara sosialisasi PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Negara (RKAKL).

Dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan selamat beribadah puasa bagi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan dengan harapan semoga amal ibadah kita di bulan suci ini mendapat pahala dan ridho dari Allah SWT.

Bapak dan Ibu serta hadirin peserta sosialisasi,

Penyusunan RKA KL yang dilakukan setiap tahun merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam siklus penganggaran dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara prinsip, penyusunan RKAKL merupakan tanggung jawab setiap Menteri atau Pimpinan lembaga atas alokasi anggaran lembaga yang dikelolanya berdasarkan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Mencermati dinamika kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan setiap tahun, penyusunan RKAKL harus senantiasa disesuaikan sehingga sejalan dengan situasi dan kondisi.

Pengaturan mengenai penyusunan dan penelaahan RKAKL menurut hemat saya merupakan hal yang sangat strategis dan harus dibuatkan pedoman pelaksanaannya secara jelas. Hal ini terutama mengingat

RKAKL yang disusun Kementerian Negara dan Lembaga merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang memuat penjabaran rencana kerja yang akan dihasilkan oleh setiap Kementerian/Lembaga dan dukungan anggaran yang ditetapkan.

Saya ingin menggarisbawahi persoalan ini karena seringkali muncul dalam implementasinya di lapangan. Persoalan-persoalan itu muncul karena ketidakjelasan cara menyusun dan menelaah RKAKL. Oleh karena itu, inisiatif dan langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Kementerian Keuangan ini menjadi sangat penting.

Saya ambil contoh saja. Ketika kita membahas RAPBNP 2014 lalu, salah satu hal yang mempercepat proses pembahasan adalah penetapan format yang sama di komisi DPR. Jadi saya bisa membayangkan petunjuk penyusunan dan penelaahan RKAKL ini sangat penting karena dengan ini kita bisa memiliki standar yang sama, format yang sama, dan proses yang dimengerti oleh semua pihak. Disamping itu, adanya shifting peran dan tanggung jawab pada Kementerian/Lembaga dalam menjamin kualitas RKAKL yang disusun oleh setiap unit di lingkungan Kementerian Lembaga memerlukan pengaturan yang lebih tegas untuk masing-masing pihak terkait dalam proses perencanaan penganggaran.

Berbeda dengan pola sebelumnya, sejak tahun lalu pembahasan APBNP 2013 tidak lagi dipresentasikan oleh Kementerian Keuangan karena yang mengetahui secara rinci adalah Kementerian/Lembaga. Dalam konteks ini, maka peran Kementerian/Lembaga menjadi sangat penting. Ini yang kami sebut sebagai shifting peran dan tanggung jawab.

Bapak Ibu hadirin peserta sosialisasi,

Berkaitan dengan PMK mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKAKL yang disosialisasikan pada pagi hari ini, saya ingin menekankan beberapa hal sebagai berikut.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-data 11/2013 tanggal 22 Mei 2014 tentang peninjauan atas undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditetapkan bahwa: DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembahasan APBN-APBD secara terperinci sampai dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja.

Ini sudah kita laksanakan dalam pembahasan APBNP lalu. DPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan penundaan persetujuan RKAKL atau pemberian tanda blok bintang. Seluruh pembahasan persetujuan oleh komisi DPR harus diberikan dalam batas waktu penyelesaian sebelum Undang-Undang APBN disahkan.

Sebagai implikasi atas putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka pengajuan gugatan signifikan antara lain mekanisme penyusunan RKAKL antara komisi terkait di DPR dengan Kementerian/Lembaga dilakukan pada level strategis yaitu di tatanan unit organisasi, fungsi, dan program.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga. Ketika kita membahas hal ini dengan komisi memang tidak mudah. Di satu-dua komisi terdapat persoalan. Tapi secara umum saya katakan bahwa pada akhirnya kita berhasil membuat APBNP 2014 disahkan dan pembahasannya sampai di tingkat program. Buat saya ini adalah sebuah penanda kita memasuki tahapan baru dimana pembahasan di komisi itu dibatasi sampai dengan tingkat program. Ini sebetulnya sudah kita implementasikan.

Berikutnya adalah persetujuan hasil pembahasan RKAKL oleh komisi DPR dirinci menurut organisasi, fungsi dan program seiring perlunya penyesuaian beberapa format dokumen, antara lain himpunan RKAKL, lembar persetujuan DPR, dan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat.

Hal yang nyata misalnya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR. Dulu biasanya diberikan lampiran rincian kegiatan. Namun pada tahun ini tidak lagi ada rincian kegiatan dalam kesimpulan Badan Anggaran, begitu juga dalam kesimpulan komisi. Rincian kegiatan ini nanti akan muncul dalam lembaran Keputusan Presiden yang disampaikan secara terpisah. Saya kira nanti Direktorat Jenderal Anggaran akan mengunggah data yang perlu dimunculkan.

Hal ini bukan berarti pembahasan dengan DPR terbatas pada program di dalam pengalokasian anggaran. Bukan berarti pula kita menghilangkan transparansi atau tidak lagi mau terbuka terhadap kegiatan. Kegiatan itu tidak dibahas ketika kita membahas mengenai alokasi anggaran, tetapi setelah alokasi

anggaran diterbitkan maka transparansi harus tetap diwujudkan. Nanti rincian kegiatannya akan muncul di website.

Jadi itu sebabnya DPR RI tetap akan punya peran pengawasan tetapi bukan dalam pengalokasian anggaran. Prinsip transparansi akan tetap dilakukan, bahkan publik juga akan bisa melihatnya melalui website. Saya kira dalam satu-dua minggu ini Insya Allah seluruh kegiatan akan bisa dilihat di sana, meski format di dalam pembahasan DPR-RI tentu berbeda.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas RKAKL maka penegasan peran dan tanggung jawab antara Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga dalam meneliti RKAKL dan dalam melakukan review RKAKL merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, dalam PMK ini pengaturannya telah dituangkan dalam pasal yang terpisah, serta telah dilengkapi pedoman penelitian dan review RKAKL pada salah satu lampiran.

Seperti yang tadi saya sampaikan, yang paling tahu mengenai kegiatan dan program adalah Bapak dan Ibu dari Kementerian Lembaga sendiri. Namun meski tidak lagi dibutuhkan presentasi mengenai Rancangan Anggaran Belanja (RAB), bukan berarti *governance*-nya bisa diabaikan. Pihak yang berperan sangat penting di sini adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Peran APIP harus ditingkatkan dan APIP menjadi sangat sentral dalam proses penganggaran, penelaahan, dan juga pertanggungjawaban.

Disamping beberapa perubahan hal tersebut, PMK ini juga mengatur mengenai petunjuk penyusunan RKAKL yang dilengkapi dengan lima lampiran baru yang sudah disempurnakan. Saya berharap proses penyusunan ini dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Hal ini sangat penting karena kita tidak ingin proses penganggaran berlangsung begitu lama dan membingungkan. Oleh karena itu, petunjuk dalam perencanaan, penelaahan dan pengisian RKAKL menjadi sangat penting.

Bapak/Ibu serta hadirin peserta sosialisasi,

Ada satu hal lagi yang juga harus menjadi perhatian kita di tahun 2014 ini. Penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan (baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban keuangan) akan membawa

perubahan dalam business process maupun peranpihak-pihak yang terkait, tidak terkecuali dalam proses perencanaan penganggaran untuk menyelesaikan RKAKL dan DIPA tahun anggaran 2015.

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menggunakan SPAN secara penuh. Dengan ditetapkannya SPAN, mekanisme penyelesaian maupun dukungan sistem aplikasi yang digunakan juga mengalami perubahan. Selain itu dalam rangka penyederhanaan proses penelaahan, Kementerian Keuangan juga akan menerapkan penelaahan RKAKL secara online.

Saat ini telah diterapkan sebanyak 43 Kementerian/Lembaga dari 86 Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan penelaahan RKAKL secara online. Hal ini merupakan langkah yang sangat strategis dan perlu terus dikembangkan. Saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah langkah kita berikutnya. Salah satu cara untuk mempercepat proses penelaahan, pengisian, dan perencanaan adalah secara online.

Tetapi, saya ingin berpesan kepada Direktorat Jenderal Anggaran agar penerapan SPAN secara online dilakukan secara bertahap. Kita harus melakukan uji coba berkali-kali. Untuk mengubah mindset kita yang terbiasa mengerjakan secara manual menjadi pengguna online tidak bisa dilakukan secara seketika.

Contoh mudahnya, kalau kita terbiasa mencatat dengan tulisan tangan dan kemudian harus menggunakan perangkat elektronik seperti iPad atau komputer, selalu butuh waktu untuk terbiasa. Kadang-kadang karena sudah terbiasa dengan cara manual ada data yang tidak kitaikutsertakan. Oleh karena itu saya minta dalam tahap transisi ini kedua metode penganggaran dilakukan sekaligus.

Nantinya ketika kita sudah mulai terbiasa dengan sistem ini, prosesnya akan berjalan lebih mudah. Diharapkan tahun 2015 nanti seluruh Kementerian/Lembaga sudah menerapkan penelaahan RKAKL secara online. Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke sini lagi karena prosesnya bisa dilakukan dimanapun.

Ini adalah bagian dari transparansi karena proses interaksi menjadi sangat minimal. Untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan penelaahan RKAKL secara online, saya minta para petugas penelaah baik di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Bappenas, maupun petugas di Kementerian/Lembaga diberikan pelatihan. Sebagai contoh, ketika saya harus mengisi pembayaran pajak secara online, saya harus belajar dulu meskipun prosesnya sangat simpel. Kadang-kadang kita lupa cara login-nya. Sudah di tengah proses juga lupa angka mana yang harus dimasukkan atau tombol mana yang di klik. Jadi proses

sosialisasi dan pelatihan ini sangat penting. Kalau tidak begitu nanti teman-teman Direktorat Jenderal Anggaran akan sibuk menerima panggilan telepon yang menanyakan mana yang harus di klik atau mana yang harus di cek. Jadi sosialisasi menjadi sangat penting ketika kita masuk ke dalam sebuah sistem baru.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta sosialisasi,

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, sekali lagi saya menghimbau seluruh jajaran Direktorat Jenderal Anggaran sebagai mitra kerja Kementerian/Lembaga, kiranya dapat mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga kualitas perencanaan penganggaran yang dituangkan dalam RKAKL dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga akuntabilitas. Disamping itu melalui sinergi yang dibangun dan terus dikembangkan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga, saya yakin kita dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Selanjutnya, melalui sosialisasi hari ini kalau ada yang kurang jelas mohon ditanyakan secara rinci. Tentu nantinya kesempatan menanyakan hal teknis selalu terbuka. Namun pada hari ini teman-teman dari Direktorat Jenderal Anggaran pada hari ini memang memberikan waktu untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya secara rinci.

Pak Syauckani dan kawan-kawan tolong proses online ini prosesnya dibuat sederhana karena jika sophisticated akan membingungkan. Kalau melihat yang sophisticated saya pusing sehingga yang terjadi adalah saya minta tolong orang untuk mengisikannya. Jadi, saya berharap prosedurnya mudah dan sederhana.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga saya nyatakan resmi dimulai.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.